

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari perspektif sejarah, istilah "ketahanan pangan" juga dikenal sebagai "keamanan pangan" pertama kali digunakan sebagai kebijakan pangan global pada tahun 1971 saat krisis pangan terjadi. Oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara yang sedang berkembang, dari krisis produksi dan pasokan makanan pokok. Fokus PBB pada masa itu adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan pembebasan dunia dari krisis pangan. Namun, pada *International Conference of Nutrition* pada tahun 1992, pimpinan negara anggota PBB menyempurnakan definisi ini dengan mengatakan bahwa tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang. Ini berarti bahwa setiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan finansial terhadap jumlah makanan yang cukup untuk tetap sehat dan produktif.

Menurut Ketut Kariyasa (2012). Pentingnya ketahanan membuat manusia tidak dapat hidup tanpa makanan. Salah satu tujuan utama dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan negara adalah mencapai ketahanan pangan nasional. Kecukupan pangan dan ketersediaan makanan tidak hanya memainkan peran penting dalam pemenuhan energi kalori yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan. Secara lintas pemerintahan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi hasilnya belum menjamin kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang berkaitan dengan laju peningkatan produksi masih menjadi masalah yang menantang untuk diselesaikan. Laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang relatif tinggi sulit dicegah di satu sisi, dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (1,49% per tahun) di sisi lain. Kedua faktor ini berdampak signifikan pada pemenuhan kebutuhan pangan dari budidaya. Pertanian Perubahan iklim dan volatilitas harga pangan

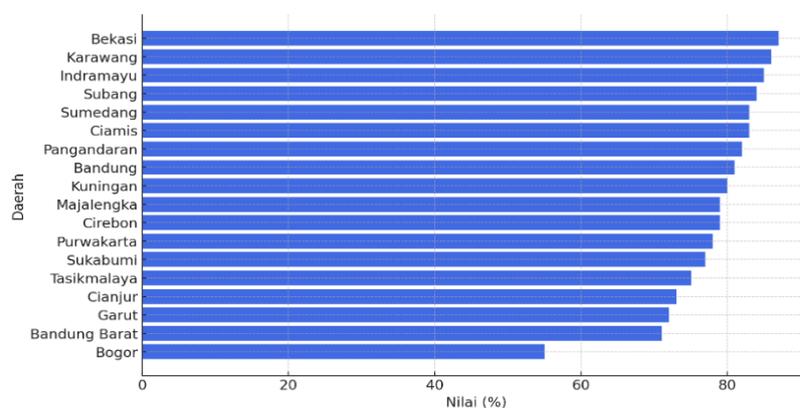
merupakan faktor lain yang sulit dikendalikan. Kedua faktor ini mengurangi motivasi petani untuk menghasilkan makanan.

Menurut Hafizha Alifya (2024). Isu ketahanan pangan merupakan kerawanan pangan dapat terjadi ketika ada masalah atau hambatan dalam sistem jaringan pangan. Beberapa kondisi yang menyebabkan kerawanan pangan termasuk ketidakpastian tentang bagaimana pangan dapat diakses atau tersedia, jumlah pangan yang tidak mencukupi, atau pangan yang tidak dapat digunakan karena keterbatasan akses. Selain itu, pertumbuhan populasi, keterbatasan lahan pertanian, atau faktor lain dapat menyebabkan kerawanan pangan. Hubungan antara keamanan pangan dan kerawanan selalu berubah, terutama dalam hal apa yang harus dilakukan tentang keamanan pangan. Membangun lumbung pangan (food estate) adalah salah satu upaya negara untuk mencapai dimensi "ketersediaan" (availability). Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terletak di suatu area lahan yang sangat luas.

Berdasarkan teori AR. Rohman Taufiq Hidayat (2019). Kondisi ketahanan pangan terkini yaitu gangguan sosial dan ekonomi terjadi di suatu daerah karena kekurangan makanan. Ketahanan pangan belum terpenuhi oleh pemerintah Indonesia di beberapa wilayah (FWP, 2015). Ketahanan pangan sendiri didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk melindungi makanan dari cemaran biologis, kimia, atau bahan lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau keyakinan masyarakat. Dengan luas 35.377,76 km², Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 626 kecamatan, pada tahun 2016. Provinsi Jawa Barat memiliki populasi sebesar 47,38 juta orang dengan pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 1,54 persen per tahun. Namun, pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan, karena produksi padi di Provinsi Jawa

Barat telah menurun hingga 363.928 ton dalam lima tahun terakhir. Jika hal ini berlanjut, ini dapat menyebabkan defisit keterjangkauan.

Menurut Swastika (2008) Aspek ekonomi dalam ketahanan pangan berkaitan dengan kapasitas individu, keluarga, maupun negara untuk mendapatkan pangan yang layak dan berkesinambungan melalui kondisi keuangan yang memadai. Faktor-faktor seperti kemampuan membeli, harga pangan, pendapatan, stabilitas ekonomi, serta distribusi pangan turut berperan penting dalam menentukan akses dan tingkat konsumsi pangan



Gambar 1.1. Indeks Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Barat 2022 - 2024

Sumber : Data Pangan Nasional

Dari tahun 2022 hingga 2024, data indeks ketahanan pangan menunjukkan nilai-nilai di berbagai daerah di Jawa Barat. Indeks ini mencerminkan kemampuan setiap daerah untuk menyediakan pasokan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi warganya. Data berikut dijelaskan:

Karawang dan Bekasi memiliki nilai indeks ketahanan pangan tertinggi pada tahun 2022, masing-masing sebesar 86,03 dan 86,15. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut memiliki sistem pangan yang relatif kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan. Pada tahun 2022, Bogor memiliki nilai indeks terendah 54,18; meskipun ada peningkatan besar menjadi 70,57 pada tahun 2023, nilai ini masih menunjukkan masalah dengan ketahanan

pangan kota. Indeks ketahanan pangan beberapa daerah meningkat secara signifikan. Misalnya, Sumedang meningkat dari 83,12 pada tahun 2022 menjadi 86,88 pada tahun 2024, menunjukkan upaya yang berhasil untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Selain itu, Cianjur menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 75,82 pada tahun 2022 menjadi 80,6 pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan akses dan ketersediaan makanan.

Jumlah indeks ketahanan pangan di beberapa wilayah berubah, seperti Tasikmalaya dan Cirebon. Misalnya, Tasikmalaya menurun dari 75,88 pada tahun 2022 menjadi 75,68 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 78,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai variabel, seperti kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan kondisi cuaca, dapat memengaruhi ketahanan pangan. Data indeks ketahanan pangan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ketahanan pangan di berbagai daerah. Peningkatan nilai indeks di banyak daerah menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pangan, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama di daerah dengan nilai indeks yang lebih rendah. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan produksi pangan, aksesibilitas, dan edukasi masyarakat tentang gizi sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

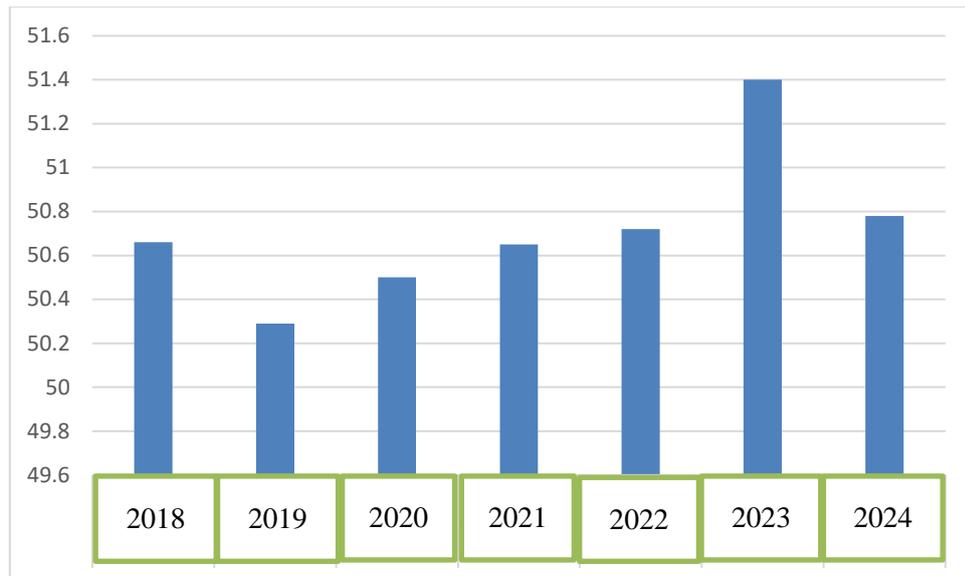
Hubungan antara jumlah harga pangan, konsumsi pangan rumah tangga, konsumsi pangan industri, jumlah penduduk, dengan ketahanan pangan yaitu terbagi menjadi 4 yaitu.

1. Harga pangan memainkan peran penting dalam ketahanan pangan. Jika harga pangan tinggi, akses masyarakat terhadap makanan menjadi terbatas, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, jika harga pangan stabil dan terjangkau, ketersediaan dan aksesibilitas makanan meningkat, mendukung ketahanan pangan.

2. Konsumsi pangan oleh industri, seperti industri makanan dan minuman, mempengaruhi ketersediaan pangan di pasar. Jika industri mampu memproduksi dan mendistribusikan pangan secara efisien, ketersediaan pangan akan meningkat, yang dapat mendukung ketahanan pangan. Namun, jika konsumsi pangan industri terlalu meningkat sambil mengabaikan produksi lokal, hal ini dapat mengancam ketahanan pangan.
3. Konsumsi pangan di tingkat rumah tangga mencerminkan pola makan dan gizi masyarakat; jika konsumsi pangan rendah atau tidak seimbang, hal ini dapat menyebabkan masalah gizi dan mengurangi ketahanan pangan. Edukasi tentang pola makan sehat dan pengelolaan sumber daya pangan di tingkat rumah tangga sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dari populasi, penting untuk merencanakan dan mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Ini karena jika pertumbuhan produksi pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi, akan terjadi tekanan pada sistem pangan, yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut dan ketahanan pangan sangat terkait.

Meningkatkan ketahanan pangan suatu negara atau daerah dapat dicapai melalui penerapan kebijakan yang baik untuk mengelola harga pangan, meningkatkan produksi dan distribusi makanan, dan meningkatkan kesadaran akan konsumsi makanan yang sehat.



Gambar 1.2. Konsumsi Pangan Industri di Jawa Barat 2018-2024

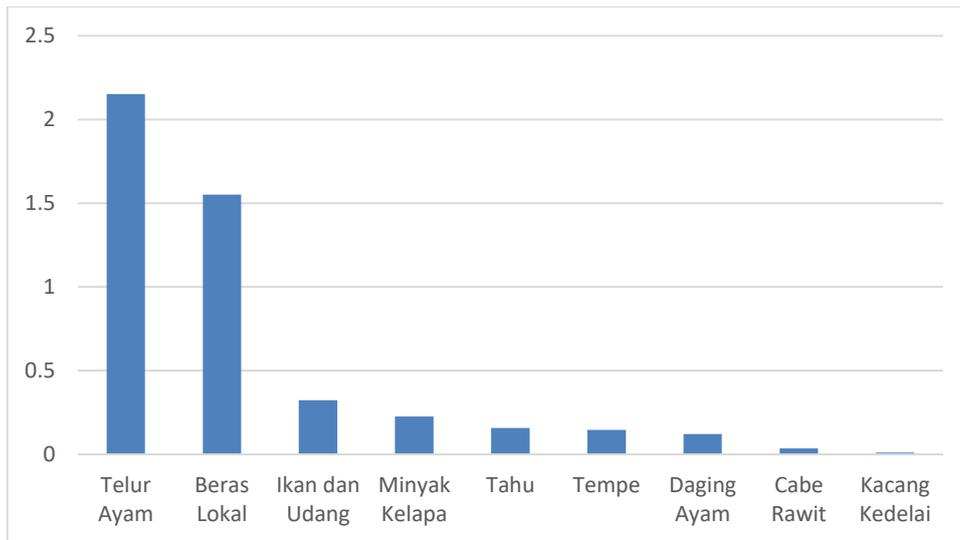
Sumber : BPS 2024

Dari tahun 2018 hingga 2022, konsumsi pangan industri relatif stabil di kisaran 50%, menunjukkan bahwa setengah dari kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi oleh produk industri. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 51,40%, yang menunjukkan kemungkinan adanya . Perubahan pola makan masyarakat ke arah produk instan/siap saji. Pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman. Kenaikan aktivitas urbanisasi dan kesibukan yang membuat masyarakat lebih bergantung pada makanan praktis. Tahun 2024 menurun sedikit menjadi 50,78%, namun masih berada di atas rata-rata tahun sebelumnya. Konsumsi pangan industri di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren stabil dan dominan, dengan rata-rata lebih dari 50% dari total konsumsi pangan masyarakat berasal dari produk pangan industri. Ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi dari pangan segar ke pangan olahan.

Konsumsi dan pendapatan umumnya lebih sulit untuk diukur secara akurat, dan pendapatan dapat bervariasi dari waktu ke waktu meskipun standar hidup tidak. Namun, data konsumsi tidak selalu tersedia: estimasi terbaru yang diberikan di sini menggunakan data untuk sekitar

dua pertiga negara, tetapi karena perbedaan waktu, kualitas, dan pelatihan pencacah, bahkan survei yang serupa mungkin tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Selain itu, perbandingan negara-negara pada tingkat pembangunan yang berbeda dapat menimbulkan masalah karena perbedaan kepentingan relatif dalam konsumsi barang non pasar. Semua nilai konsumsi barang di pasar lokal (termasuk produksi sendiri, yang penting dalam ekonomi pedesaan yang belum berkembang) harus dimasukkan dalam total pengeluaran konsumsi, tetapi mungkin tidak. Sebagian besar data survei saat ini mencakup penilaian untuk konsumsi atau pendapatan dari produksi sendiri, tetapi metode penilaian berbeda.

Menurut Tiberti (2015). Sementara itu, sejak awal pemikiran pembangunan, peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi telah menjadi perhatian utama. Secara umum diketahui bahwa peran pertanian berubah seiring dengan tahap perkembangan pembangunan, termasuk peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kegagalan umumnya akan terjadi jika pertumbuhan pertanian diabaikan pada tahap awal pembangunan, Strategi pengentasan kemiskinan tidak boleh mengabaikan pembangunan pertanian, terutama di negara-negara yang masih bergantung pada ekonomi pedesaan. Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan produktivitas tanaman padi yang stabil dari tahun 2018 hingga 2024, menjadikannya salah satu provinsi utama dalam produksi padi di Indonesia, berkat kombinasi luas panen yang stabil, produktivitas tinggi, penggunaan teknologi modern, dukungan kebijakan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim. perusahaan dengan menjual tenaganya (fisik dan mental) kepadanya dan memperoleh balas jasa sesuai dengan aturan dan perjanjian (Opan Arifudin 2020)



Gambar 1.3. Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Jawa Barat 2018-2024

Sumber : BPS 2024

Dari data tersebut menunjukkan dari tahun 2018 sampai 2024. Peningkatan naik yang dimana. Telur Ayam selalu menempati posisi tertinggi dalam konsumsi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 (2,336 Kg) dan cenderung stabil tinggi dari tahun ke tahun. Beras Lokal yang juga konsisten tinggi, walaupun mengalami sedikit penurunan dari 1,569 Kg (2021) menjadi 1,521 Kg (2024). Ikan dan Udang menunjukkan tren meningkat secara bertahap, dari 0,324 Kg (2018) menjadi 0,359 Kg (2024). Konsumsi minyak kelapa secara umum mengalami sedikit peningkatan selama periode 2018-2024. Nilai konsumsi awal berada di angka 0,227 Liter (2018) dan mencapai angka tertinggi pada (2021) yaitu 0,253 Liter, sebelum sedikit menurun dan stabil pada kisaran 0,244 Liter-0,245 Liter di tiga tahun terakhir. Tahun 2022-2024: Terjadi penurunan kecil dan kemudian stabilisasi konsumsi. Pada (2022), konsumsi turun menjadi 0,244 liter, lalu hanya berubah sedikit menjadi 0,246 Liter (2023) dan 0,245 Liter (2024). Daging Ayam menunjukkan tren naik, dari 0,121 (2018) ke 0,154 (2024). Konsumsi cabe rawit dalam kurun waktu 2018-2024 menunjukkan fluktuasi ringan dengan kecenderungan meningkat secara perlahan, dari 0,035 liter menjadi 0,041 liter per kapita per tahun. Meskipun angkanya kecil, cabe rawit tetap memiliki peran

penting sebagai komoditas pelengkap dalam ketahanan pangan rumah tangga. Pola konsumsi yang stabil menunjukkan bahwa komoditas ini memiliki nilai budaya dan preferensi yang tinggi, khususnya di wilayah yang masyarakatnya memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan pedas. Konsumsi tahu selama periode 2018–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan perbedaan yang sangat tipis antar tahun. Konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 sebesar 0,158 Kg, sementara konsumsi terendah berada pada tahun 2022 dan 2024, yakni 0,148 Kg. Secara keseluruhan, konsumsi tempe tahu 2018–2024 berada dalam kisaran rendah yaitu antara 0,136Kg – 0,146Kg. Tempe tetap menjadi sumber protein nabati yang penting dalam pola makan masyarakat Indonesia, terutama karena harganya yang terjangkau dan kandungan gizinya yang tinggi. Kacang Kedelai konsisten sangat rendah (0,001) di seluruh tahun.

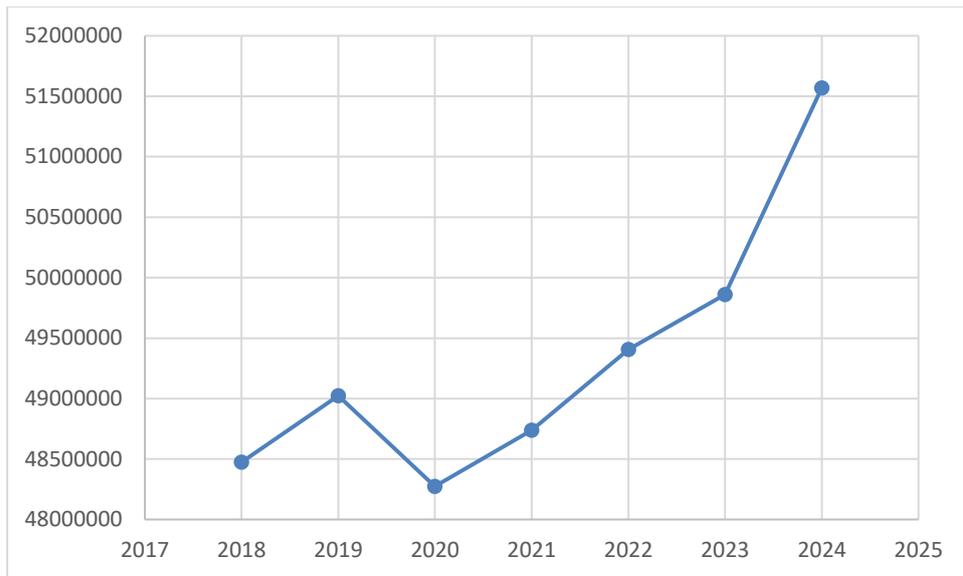
Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang bermanfaat tentang pola konsumsi pangan masyarakat. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat program ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan memahami bagaimana preferensi makanan masyarakat berubah. Salah satu alasan pentingnya diversifikasi pangan adalah bahwa keanekaragaman konsumsi pangan di Indonesia digambarkan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Salah satu alasan pentingnya diversifikasi pangan adalah bahwa pengurangan konsumsi beras di tingkat nasional akan mengurangi ketergantungan impor beras dari negara lain.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Sumber daya manusia dan ketahanan bangsa bergantung pada kecukupan pangan, jadi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi manusia Indonesia, makanan harus tersedia setiap saat dalam

jumlah yang cukup, merata, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Masyarakat Indonesia biasanya mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat, sehingga ketergantungan mereka pada beras semakin meningkat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002.

Menurut teori Ni Made Suryastiri (2008). Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya makanan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan makanan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam pengertian ini, produksi dalam negeri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara efektif. Namun, kita tetap berpendapat bahwa kebutuhan pangan nasional harus dipenuhi secara mandiri dengan memberdayakan modal alam, modal manusia, modal sosial, dan modal ekonomi bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dan ketahanan pangan.

Menurut Indrawan Firdauzi (2021). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola konsumsi dan respons rumah tangga terhadap perubahan harga komoditas pangan dan pendapatan mereka. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada pola konsumsi rumah tangga yang berubah dari waktu ke waktu di berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat memberikan perspektif tentang pola konsumsi di Indonesia dan memahami serta konsumsi rumah tangga yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Diharapkan kontribusi dari penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pola konsumsi di Indonesia dan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang komoditas pangan yang responsif bagi masyarakat di Indonesia.



Gambar 1.4. Jumlah penduduk di Jawa Barat 2018-2024

Sumber : Data BPS 2024

Data jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Berikut adalah analisis dari data tersebut.

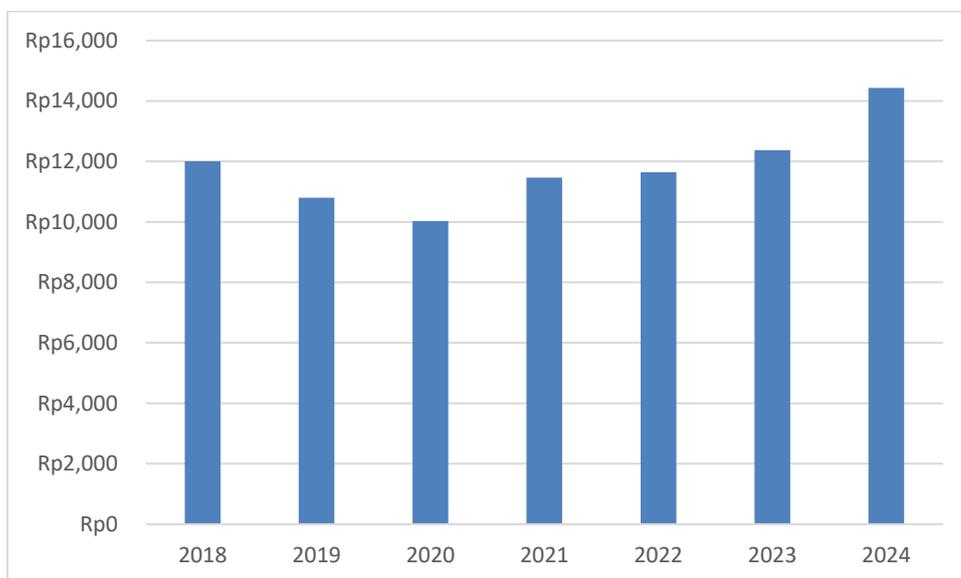
Tahun 2018, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48.683.861 orang. Ini merupakan titik awal untuk melakukan analisis tentang perkembangan populasi provinsi ini. Berbeda dengan di tahun 2019 Jumlah penduduk naik sebesar 49.316.712 orang, terjadi peningkatan sebesar 632.851 orang dari tahun sebelumnya. Pertambahan ini mengindikasikan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, sekitar 1,3%. dan di tahun 2020 Jumlah penduduk: 49.935.858 orang. Pertumbuhan penduduk tetap stabil, dengan kenaikan sekitar 619.146 orang. Pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan jumlah penduduk Jumlah penduduk 48.782.400 orang. Meningkat kembali pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk Jumlah penduduk: 49.405.810 orang Populasi kembali naik sekitar 623.410 orang. di tahun 2023 jumlah penduduk meningkat kembali dengan angka 49.927.400 orang. Tingkat pertumbuhan mulai sedikit melambat, menunjukkan pola transisi demografis yang umum terjadi di daerah padat penduduk. Terjadi peningkatan di tahun 2024 dengan Jumlah penduduk: 50.345.200 orang. Untuk pertama kalinya, jumlah penduduk Jawa Barat

menembus 50 juta orang. Ini merupakan tonggak penting, menunjukkan status Jabar sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Menurut teori Nurmanaf (2005). Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat cenderung meningkat dalam jangka panjang, meskipun ada variasi. Peningkatan jumlah penduduk juga dapat berdampak pada berbagai aspek provinsi, seperti ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan populasi, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ini. Dengan meningkatkan pendapatan baik di bidang pertanian maupun non-pertanian, strategi pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, pertumbuhan ekonomi selalu menjadi perhatian utama (Pangastuti, 2015). bagi petani di daerah pedesaan, di mana luas lahan pertanian biasanya terbatas. Desa-desa berbasis sawah memiliki kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang berbeda dibandingkan dengan desa-desa berbasis lahan kering .

Menurut teori yang di jelaskan oleh Lukas Dwi Aryanto (2019). Di pedesaan rumah tangga petani lahan sempit termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan kata lain, sebagian besar petani lahan sempit termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Petani pada dasarnya menghadapi dua masalah penting yang saling terkait. Kelompok masyarakat ini memiliki dua sisi penguasaan dan pengusahaan lahan yang terbatas menghasilkan pendapatan yang rendah, dan pengetahuan mereka terbatas. Pada kenyataannya, dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka, angkatan kerja rumah tangga petani yang lahan sempit telah beralih ke pekerjaan di luar sektor pertanian untuk mendapatkan uang tambahan. Karakteristik pekerjaan, juga disebut sebagai karakteristik pekerjaan, mencakup besarnya tanggung jawab, variasi tugas, dan sejauh mana pekerjaan itu sendiri memberikan kepuasan kepada karyawan. Karena luas penguasaan lahan yang

terbatas dan minat yang rendah terhadap pertanian, penduduk desa saat ini lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian. Namun, untuk mengatasi masalah ini, banyak penduduk desa memilih bekerja di luar sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan kehidupan keluarga mereka.



Gambar 1.5. Harga Pangan di Jawa Barat 2018-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan perkembangan harga beras premium di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024, terlihat bahwa harga mengalami fluktuasi tahunan dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode penelitian. Pada tahun 2018, harga beras premium tercatat sekitar Rp12.000 per kilogram, kemudian menurun menjadi kurang lebih Rp11.000 per kilogram pada tahun 2019, dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 yakni Rp10.000 per kilogram. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang relatif stabil serta adanya kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Memasuki tahun 2021, harga kembali mengalami peningkatan menjadi Rp11.500 per kilogram dan berlanjut naik pada tahun 2022 sebesar Rp11.700 per kilogram. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2023 yang mencapai Rp12.300 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mencerminkan adanya tekanan biaya dari sisi produksi, distribusi, serta pengaruh inflasi yang berdampak pada harga

di tingkat konsumen. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2024, ketika harga beras premium melonjak hingga Rp14.500 per kilogram. Kondisi ini menggambarkan dinamika pasar pangan yang cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun harga beras premium di Jawa Barat sempat mengalami penurunan, namun secara keseluruhan memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menegaskan perlunya langkah kebijakan yang lebih efektif dari pemerintah, baik berupa stabilisasi harga, penguatan cadangan pangan, maupun pengawasan distribusi, guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Jumlah harga pangan biasanya merujuk pada nilai total atau harga dari berbagai jenis komoditas pangan di pasar. Ini mencakup biaya produksi, distribusi, dan faktor lain yang mempengaruhi harga konsumen. Faktor-faktor yang Berpengaruh:

1. Produksi: Kualitas bahan pangan yang diproduksi dan ketersediaannya
2. Permintaan: Tingkat kebutuhan pembeli terhadap makanan tertentu.
3. Inflasi: Perubahan nilai uang yang dapat berdampak pada harga barang.
4. Kebijakan Pemerintah: Peraturan, subsidi, dan kebijakan perdagangan yang dapat memengaruhi harga pasar
5. Tren di grafik: Harga makanan telah berubah dari 2018 hingga 2022. Puncak harga yang signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan angka 1.6. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan situasi ekonomi global.
6. Relevansi: Kebijakan pemerintah harus memantau harga pangan untuk pengembangan ekonomi, perencanaan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi.

Menurut Dwidjono H. Darwanto (2005). Hal ini tersurat pada rumusan pembangunan pertanian bahwa sasaran indikatif produksi komoditas utama tanaman pangan sampai tahun

2006 dan cadangan pangan pemerintah juga masih berbasis pada beras. Namun demikian, dengan semakin berkurangnya areal garapan per petani, keterbatasan pasokan air irigasi dan mahalannya harga input serta relatif rendahnya harga produk dapat menjadi faktor-faktor pembatas/kendala untuk program peningkatan kesejahteraan dan kemandirian petani yang berbasis sumber daya lokal tersebut. Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani secara operasional akan dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi. Sebagai tanda kekayaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pangan harus selalu dijamin oleh pemerintah dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecukupan pangan berperan penting dalam menentukan kualitas intelegensi sumber daya manusia. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun.

Menurut Denny Valentino (2021). Angka pertumbuhan tersebut mencerminkan besarnya tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai ketahanan pangan. Oleh sebab itu pemerintah selalu menempatkan masalah ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, pencapaian kedaulatan pangan menjadi bagian dari agenda ketujuh Nawa Cita untuk Indonesia. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, karena masih banyak variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Melihat juga dari kondisi yang sekarang ini terjadi, yaitu situasi pandemi yang disebabkan oleh Corona virus Disease (Covid-19) yang berdampak pada aspek-aspek penting kehidupan kita baik itu kesehatan dan juga ekonomi yang merujuk pada kebutuhan utama kita sebagai manusia, yakni

makanan (pangan). Sejak menyebarnya Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tertuang dalam Asumsi Dasar Makro APBN 2020 ditargetkan akan tumbuh 5,3 %, namun berkontraksi akibat pandemi sehingga pada akhir Triwulan IV 2020 tumbuh minus 2,07% .

Menurut teori Khoirudin (2023). Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, hal ini menjadi sebuah keunggulan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan dunia. Komoditas perikanan Indonesia yang melimpah mendorong perdagangan internasional Tidak hanya negara-negara relatif miskin akan mengalami dampak lebih parah, tetapi juga mereka yang sering kekurangan sumber daya untuk menyiapkan dan mengatasi risiko perubahan lingkungan.

Menurut Asep Kusnali (2019). Kajian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah-swasta dengan industri pangan adalah cara strategis untuk mendukung program untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular yang disebabkan oleh konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Industri pangan telah bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif untuk mengurangi jumlah gula, garam, dan lemak berlebih dalam makanan olahan, termasuk Perjanjian Kewajiban Kesehatan Publik dan Pernyataan Millan. Alternatif kebijakan lainnya adalah kemitraan pemerintah-swasta, yang dapat mendorong industri pangan untuk menghasilkan makanan yang lebih sehat. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat di Sumatera Barat. Data yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Pertanian Tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Model Almost Ideal Demand System (AIDS) dibangun dan dianalisis dengan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga komoditi sendiri, harga komoditi lain, pendapatan rumah tangga, pengeluaran konsumsi, dan wilayah tempat tinggal adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pangan sumber karbohidrat. Respon harga sendiri untuk komoditi

pangan yang mengandung karbohidrat menunjukkan semua komoditi, termasuk barang normal, sedangkan respon harga silang menunjukkan hubungan substitusi dan komplementer antara komoditi tersebut. Semua barang, termasuk barang kebutuhan pokok, dan peningkatan pendapatan penduduk, dapat mengurangi dampak negatif peningkatan harga, menurut respons pendapatan. Sangat kuatnya respons terhadap perubahan harga beras terhadap komoditi lain menunjukkan bahwa intervensi kebijakan diperlukan di bidang perberasan. Karena jumlah yang diminta dipengaruhi oleh harganya, ketersediaan pangan umbi-umbian harus ditingkatkan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dikaji pada penelitian ini berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dipaparkan:

1. **Konsumsi Pangan Industri:** Sektor industri memainkan peran yang signifikan dalam ketahanan pangan, terutama dalam hal proses produksi dan distribusi. Bagaimana harga pangan dan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan mempengaruhi konsumsi pangan industri? Apakah industri pangan mampu memenuhi permintaan masyarakat di tengah volatilitas harga.
2. **Konsumsi Pangan Rumah Tangga:** Faktor ekonomi seperti harga pangan dan pendapatan sangat memengaruhi konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Apakah ada korelasi signifikan antara harga makanan dan pola konsumsi makanan rumah tangga? Bagaimana rumah tangga yang kekurangan sumber daya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ini?
3. **Jumlah Penduduk di Jawa Barat :** Jumlah penduduk di Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan naiknya kebutuhan terhadap pangan secara keseluruhan. Jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan

pertumbuhan dan distribusi pangan yang memadai, maka akan terjadi tekanan terhadap sistem pangan, baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan.

4. Harga Pangan: Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan. Rumah tangga dengan pendapatan rendah mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka ketika harga makanan meningkat. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan harga makanan berdampak pada konsumsi pangan industri dan rumah tangga.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Ketahanan Pangan, Konsumsi Pangan Industri Konsumsi Pangan Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Harga Pangan di Jawa Barat 2018-2024?
2. Bagaimana Pengaruh Konsumsi Pangan Industri, Konsumsi Pangan Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat Tahun 2018 -2024 ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan ketahanan pangan, konsumsi pangan Industri, Konsumsi Pangan Rumah Tangga, Jumlah penduduk dan Harga Pangan di Jawa Barat Tahun 2018-2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh konsumsi Pangan Industri, konsumsi pangan Rumah Tangga, Jumlah penduduk harga pangan terhadap Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan di Jawa Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sektor pangan melalui indikator utama yang berpengaruh serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pangan. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan praktis.

1.6. Manfaat Teoritis

Memperkaya kajian akademik terkait hubungan antara harga pangan, konsumsi pangan, dan demografi petani.

1.7. Manfaat Praktis

1. Memberi tambahan masukan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.
2. Membantu pelaku industri dan rumah tangga memahami pola konsumsi terkait perubahan harga pangan.
3. Mendukung perencanaan program pengembangan populasi petani untuk meningkatkan produksi pangan.

1.8. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data Ketahanan Pangan, Jumlah Harga Pangan dan Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Jawa Barat Tahun 2018-2024, untuk mengetahui Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Jawa Barat

